RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

NAMA : FARID AKMAL DJAMALUDDIN

NIM : 10200120229

Hukum tata negara merupakan sistem penataan yang berisi ketentuan mengenai struktur ketenagaaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Keterkaitan antara hukum tata Negara dengan ilmu lainnya di antaranya memiliki hubungan yang sangat erat diantaranya

Hubungan hukum tata Negara dengan ilmu Negara

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai Negara, serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata Negara mempelajari :

- Negara dalam keadaan konkrit artinya Negara yang sudah terikat waktu dan tempat
- Hukum tata Negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu Negara
- Hukum tata Negara mempelajari Negara dari segi struktur

Ilmu Negara- Ilmu Pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok tentang Negara.

Hubungan-baik, Hukum Tata Negara maupun Ilmu Negara sama-sama menjadikan Negara sebagai objek kajiannya. Tetapi kajian Hukum Tata Negara terkait Negara dibatasi atau terkait oleh tempat keadaan dan waktu tertentu (misalnya Hukum Tata Negara Indonesia dll). Sementara kajian ilmu Negara bersifat umum/universal (teoritis-ilmiah).

Selain memiliki hubungan yang erat Ilmu Negara merupakan mata kuliah Hukum Tata Negara, dan bahkan salah satu persyaratan untuk mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara adalah lulus mata kuliah ilmu Negara, sehingga pada mata kuliah hukum tata Negara

Hukum Administrasi Negara (HAM) hukum yang mengatur dan mengikat aparatur Negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Negara/pemerintahan.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan ilmu politik

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata Negara.

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA.

Sumber hukum merupakan asal mulanya darimana hukum itu berasal. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (source of law in formal sense) dan sumber hukum dengan arti material (source of law in material sense). Bagi kebanyakan sarjana hukum biasanya yang diutamakan adalah sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti formal itu adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara.

Secara umum sumber hukum tata negara di Indonesia terbagi atas dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

A. Sumber hukum materil

- Jimly Asshiddiqie, sumber hukum materil hukum tatanegara Indonesia adalah pancasila, dimana rumusan sial-sila pancasila merupakan falsafah hidup bernegara dan pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan sumber hukum materil yang tidak hanya sebatas menjiwai, tapi harus dilaksanakan dan tercermin dalam setiap peraturan hukum Indonesia.
- Bagir Manan, sumber hukum materil hukum tatanegara Indonesia adalah dasar dan pandangan hidup bernegara serta kekuatan –kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata Negara.
- Ahmad Ali. Sumber hukum materil hukum tatanegara Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dari mana dan dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan, menurut sumber hukum materil, seperti loyalitas agama dan local (kedaerahan) masih cukup berperan dalam kultur hukum di Indonesia.

Sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang menentukan isi atau suatu

peraturan atau kaidah yang mengikat setiap orang. contoh sumber hukum materil yaitu nilai agama,kesusilaan,kehendak tuhan,akal budi,bangsa,hubungan sosial,kekuatan politik dan keadaan geografi.

B. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum.

- **Undang-undang**
- **Yurisprudensi**
- **Konvensi**
- **Traktat**
- **Doktrin**

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Pengertian asas hukum

H. J. Homes. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

A. R. Lacey Asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar lima berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.

Satjipto Rahardjo. Asas- hukum adalah unsur yang paling penting dan pokok dari sebuah peraturan hukum, sehingga beliau mengartikan asa hukum sebagai "jantungnya" peraturan hukum, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum.

Asas hukum berfungsi menjaga ketaatan atau konsistensi agar dalam proses pembentukan peraturan hukum, maupun dalam penerapannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Serta asas hukum juga berfungsi mengatasi konflik ,tidak menjamin kedepannya bahwa akan ada bentrokan yang terjadi antar peraturan atau tindakan pemerintah yang satu dengan yang lainnya.disini asas hukum menjadi batu uji coba jika pertentangan yang terjadi antar peraturan hukum ataupun antar organ/lembaga negara.

Fungsi Asas Hukum :

- **Fungsi Asas Hukum Sebagai Penjaga konsistensi.**

Salah satu fungsi dari asas hukum adalah menjaga ketaatan dan konsistensi. Asas hukum

akan berfungsi untuk menjaga agar dalam proses pembentukan peraturan hukum maupun dalam penerapannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, inilah yang mendasari kenapa setiap penyelenggara Negara wajib memahami asas-asas hukum, dengan memahami asas hukum dengan memahami asas hukum diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan.

- Fungsi Asas Hukum untuk Mengatasi Konflik.

Asas hukum mengatasi konflik bahwa asas hukum dapat dijadikan sebagai salah satu uji jika terjadi pertentangan antar peraturan hukum ataupun antar organ/lembaga Negara, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali kita menemukan adanya benturan atau peraturan atau tindakan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi demikian asas hukum dapat difungsikan sebagai instrument untuk mengatasi konflik.

1. Asas Pancasila :

Pancasila yang artinya setiap tindakan atau perbuatan baik perbuatan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran pancasila. Dalam bidang hukum pancasila merupakan sumber hukum materil , sehingga seluruh isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung di dalam UUD DASAR 1945.

2. Asas Negara hukum

Negara hukum adalah Negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup para warga negaranya. Maksudnya segala penyelenggara Negara harus sesuai dengan kata lain tidak menyimpang dari nilai- nilai pancasila.

3. Asas Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara ada ditangan. Di dalam materi hukum tata Negara tidak dibenarkan materi yang kiranya dapat memecah beah kesatuan Negara.

4. Asas kebijakan rakyat dan demokrasi

Kedaulatan rakyat memiliki arti kekuasaan itu ada ditangan rakyat.

5. Asas pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan yang artinya bahwa kekuasaan itu dibagi dalam beberapa bagian namun tidak dapat dipisahkan.

KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK HUKUM TATA NEGARA

Istilah konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu "constitutioin", dan berasal dari bahasa belanda "constitutie". Dalam bahasa latin "constitution,constituere", sedangkan dalam bahasa perancis yaitu "constitue". Dalam bahasa jerman yaitu "vertassung,constitution" , sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan undang-undang dasar.

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam Negara.
2. Konstitusi sebagai bentuk Negara.
3. Konstitusi sebagai factor integrasi.
4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam Negara.
5. konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu Negara.

ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

Salah satu ciri negara hukum, adalah adanya ciri pembatasan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitunalisme modern. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan raja atau ratu yang memimpin negara secara turun temurun.

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat tersebut tampak mirip dengan pendapat namun john locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan monstesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).monstesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga Negara, sedangkan john locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan ke luar dengan Negara-negara lain.

1. fungsi legislasi

2. fungsi pengawasan fungsi-fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yaitu :

- a) pengawasan terhadap penentuan kebijakan
- b) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- c) pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara
- d) pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara
- e) pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- f) pengawasan terhadap pengangkatan pejabat public dalam bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR

- kekuasaan eksekutif

cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi. tiga sistem pemerintahan Negara yaitu : 1) sistem pemerintahan presidential 2) sistem pemerintahan parlementer 3) sistem campuran

sistem pemerintahan bersifat parlementer yaitu : 1) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah 2) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen 3) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen 4) parlemen juga dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak dapat member dukungan pemerintah

sistem pemerintah dikatakan bersifat presidentil yaitu : 1) kedudukan kepala Negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan 2) kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya 3) presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen 4) kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.

Sistem pemerintah campuran terdapat ciri-ciri presidentil dan ciri-ciri parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan.

- Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga yudikatif juga bertugas memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

Lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial